

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PILAR ANTI RADIKALISME DAN EKSTREMISME

Wika Ndraha¹, Ario Pamungkas², Chintia Maharani³, Nasa Mai Ricarson Saragih⁴, Muhammad Zhafran Syafiq Putra Wahyudin⁵
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
wikandraha@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Civic education plays a strategic role in building a strong national identity and becoming a bulwark against radicalism and extremism. This research aims to examine the role of civic education as a pillar of countering radicalism and extremism through a systematic literature review (SLR) approach. The SLR method is used to identify, evaluate and synthesize previous research on this topic. The research findings show that civic education can improve understanding of Pancasila values on tolerance and diversity which are the cornerstones in building an inclusive and peaceful society. Moreover, this approach is effective in shaping students' critical awareness of the threat of radical and extremist ideologies. This study also highlights the importance of incorporating anti-radicalism materials into the curriculum in a comprehensive and dialogical manner. Therefore, civic education is not only a means of conveying knowledge, but also a tool for transforming values that can strengthen national resilience. The study recommends the development of dialogue-based and experiential education strategies to increase the effectiveness of civic education programs as a mainstay in combating radicalism and extremism.

Keywords : civic, anti-radicalism, extremism.

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam membangun jati diri bangsa yang kuat dan menjadi benteng melawan radikalisme dan ekstremisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar penanggulangan radikalisme dan ekstremisme melalui pendekatan sistematik literatur review (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian sebelumnya tentang topik ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila tentang toleransi dan keberagaman yang merupakan landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Apalagi pendekatan ini efektif membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap ancaman ideologi radikal dan ekstremis. Kajian ini juga menyoroti pentingnya memasukkan materi anti-radikalisme ke dalam kurikulum secara komprehensif dan dialogis. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana penyampaian ilmu pengetahuan, namun juga sebagai alat transformasi nilai-nilai yang dapat memperkuat ketahanan nasional. Studi ini merekomendasikan pengembangan strategi pendidikan berbasis dialog dan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan kewarganegaraan sebagai andalan dalam memerangi radikalisme dan ekstremisme.

Kata kunci : kewarganegaraan, anti-radikalisme, ekstremisme.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia

Meskipun pemerintah terus berupaya memberantas kekerasan dan terorisme, kelompok teroris masih bermunculan dan berkembang. Dalam satu

dekade terakhir, sebagian besar aksi teror di Indonesia dilakukan oleh kelompok ekstrem kanan yang menggunakan pemahaman keagamaan sebagai bingkai tindakan mereka. Selain itu, kelompok teroris tradisional juga masih aktif, sementara bentuk-bentuk baru gerakan terorisme mulai muncul. Sejak era Darul Islam (DI) pada tahun 1940-an, berbagai kelompok telah berkembang, seperti

Jemaah Islamiyah (1995), Jemaah Anshorut Tauhid (2009), Lintas Tanzim (2009), Tauhid Wal Jihad (2009), Mujahidin Indonesia Timur (2010), Front Pembela Islam Lamongan (2010), Mujahidin Indonesia Barat (2012), Forum Aktivis Syariat Islam (2013), Jemaah Ansharusy Syariah (2014), dan Jemaah Anshorut Daulah (2015).

Penanggulangan terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh karena masalahnya tidak hanya berakar pada ideologi, tetapi juga pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kurangnya akses pendidikan sering dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk merekrut anggota baru. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah mempermudah penyebaran ideologi radikal secara cepat dan luas. Pemerintah perlu memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital, pengawasan yang lebih ketat, dan pelibatan masyarakat dalam mendeteksi tanda-tanda radikalisme sejak dini. Pendekatan yang bersifat humanis, seperti program rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan pelaku terorisme, juga harus menjadi fokus untuk menghentikan regenerasi kelompok tersebut. Selain itu, kerjasama internasional dalam berbagi informasi dan teknologi sangat penting mengingat banyak kelompok teroris memiliki jaringan lintas negara. Dengan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pihak, pertumbuhan kembali kelompok teroris dapat diminimalkan secara efektif.

B. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan rasa kebangsaan yang kuat. Selain memberikan

pemahaman tentang sistem politik dan hukum, pendidikan ini melatih siswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai isu nasional, seperti korupsi, ketimpangan sosial, hingga tantangan global seperti perubahan iklim. Dengan kemampuan analitis yang diberikan, generasi muda dapat berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan bangsa.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks multikultural, pendidikan ini membantu membangun rasa kesatuan melalui pemahaman atas perbedaan budaya, agama, dan suku. Dengan menanamkan nilai toleransi dan keterampilan berdialog, generasi muda dapat menjadi agen perdamaian dan stabilitas sosial.

Di era digital, pendidikan kewarganegaraan semakin relevan. Dengan maraknya disinformasi dan ujaran kebencian, pendidikan ini membekali siswa dengan literasi digital yang kritis, sehingga mereka mampu memilah informasi secara bijak dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat memecah belah bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting bagi generasi muda (Lisnadiani Iswanda & Anggraeni Dewi, n.d.). Pertama, pendidikan ini berkontribusi dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan hukum negara, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses demokrasi. Kedua, pendidikan kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil dan setara. Ketiga, pendidikan ini juga membantu generasi muda untuk memahami keragaman budaya, agama, serta pandangan politik, sehingga mereka mampu berdialog dan bekerja sama dalam lingkungan masyarakat yang multikultural.

Terakhir, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan semangat perdamaian (Saputro & Najicha, 2022).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi radikalisme dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan yang penting untuk membentuk sikap toleransi, keberagaman, dan perdamaian. Penelitian ini juga akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mencegah proses radikalisasi. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi pendekatan dan strategi yang efektif untuk memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, dengan tujuan mengurangi penyebaran ideologi radikal. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran sosial, rasa persatuan, dan komitmen terhadap kebangsaan. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah, pendidik, dan lembaga terkait untuk memaksimalkan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan bebas dari radikalisme serta ekstremisme.

BAB II KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Definisi dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah disiplin ilmu yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan dalam sebuah negara. Dengan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, setiap masyarakat diharapkan dapat memahami perannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara dalam masyarakat.

B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang memiliki tujuan yang amat sangat penting dalam membangun karakter warga negara serta berperan secara signifikan dalam menyiapkan generasi penerus sebagai warga negara yang baik, cerdas, dan terampil.

Salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengatasi *apatism democracy education* (Azyumardi Azra, 2002 : 12). Untuk level perguruan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan akan mendorong mahasiswa agar dapat melakukan kegiatan pengkajian, analisis-sintesis, dan bahkan pemecahan masalah terkait beberapa poin sebagai berikut :

1. identitas nasional,
2. Pancasila sebagai dasar negara,
3. Pancasila sebagai sistem etika,
4. negara Indonesia,
5. konstitusi Indonesia,
6. hak dan kewajiban warga negara Indonesia,
7. demokrasi Indonesia,
8. geopolitik Indonesia,
9. geostrategi Indonesia,
10. good governance,
11. otonomi daerah, dan
12. Indonesia di tengah arus global.

Dari uraian tujuan tersebut menegaskan betapa Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu sebagai orientasi generasi muda Indonesia dalam mengembangkan jati diri serbagai warga negara Indonesia, menguatkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, serta mengembangkan kehidupan yang normal sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

C. Komponen – komponen Utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang menghafal fakta, ataupun Undang – Undang, melainkan juga tentang pengembangan keterampilan dan sikap untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil dan berkualitas.

Tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kenegaraan (*civic skills*), dan nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Kemudian dari ketiga komponen tersebut, dapat dikembangkan kembali menjadi warga negara yang percaya diri (*civic competence*), kemudian warga negara yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan akan menjadi warga negara yang mempunyai rasa percaya diri (*civic confidence*), dan warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan akan menjadikan warga negara yang komitmen (*civic commitment*). Warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Itulah tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan, tentunya dengan dukungan oleh “smart and good teacher” (Putri Indah Pertiwi, Dinie Anggraeni, 2023 : 3).

BAB III

RADIKALISME DAN EKSTREMISME

A. Definisi Radikalisme dan Ekstremisme

Radikalisme dan Ekstremisme adalah dua konsep yang seringkali dikaitkan, namun memiliki makna yang berbeda.

Radikalisme merujuk pada pandangan atau gerakan ideologis yang mendorong perubahan sosial dan politik yang mendalam melalui pendekatan yang ekstrim, sering kali melibatkan tindakan kekerasan atau metode revolusioner yang mengabaikan proses transformasi bertahap. Gerakan radikal ini, yang sering kali didorong oleh ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, berupaya untuk membongkar struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil atau menindas, dengan tujuan menciptakan tatanan sosial atau politik yang sepenuhnya baru. Dalam konteks ini, radikalisme seringkali dipandang sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan, penindasan, atau kegagalan sistem yang ada dalam memberikan keadilan atau kesejahteraan bagi kelompok tertentu.

Ekstremisme dapat dipahami sebagai bentuk keyakinan yang sangat mendalam dan teguh terhadap suatu pandangan, ajaran, atau konsep tertentu, di mana individu atau kelompok yang menganutnya tidak hanya menolak pandangan lain, tetapi juga cenderung memperlihatkan sikap atau tindakan yang melampaui batas-batas rasionalitas, toleransi, dan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Dalam banyak kasus, ekstremisme ditandai oleh ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk menerima perbedaan pandangan, sehingga mendorong penganutnya untuk menanggapi perbedaan secara agresif, bahkan dengan cara yang mengarah pada kekerasan atau perilaku destruktif.

B. Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dan Ekstremisme

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya radikalisme dan Ekstremisme yaitu ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang dianggap tidak adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pfundmair et al. (2020), menjadi pemicu utama bagi remaja untuk mencari alternatif pemahaman dan perubahan, sering kali melalui kelompok ekstremis. Selain itu, keinginan untuk menemukan identitas yang jelas (Сапанговна et al., 2023) turut mempengaruhi kerentanannya terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa remaja yang merasa terpinggirkan, tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan yang berkualitas, atau peluang ekonomi yang terbatas, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk dipengaruhi oleh ideologi radikal (Mulyana, 2020). Tidak kalah pentingnya, pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama, terutama dalam konteks Islam yang moderat, dapat menyebabkan remaja mengembangkan pandangan yang sempit dan eksklusif, yang menjadikannya lebih rentan terhadap radikalisasi. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk membentuk kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta toleransi, yang dapat menjadi benteng untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme di kalangan remaja.

C. Dampak Radikalisme dan Ekstremisme bagi Masyarakat dan Negara

Dampak radikalisasi dan ekstremisme tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas bagi masyarakat dan negara. Dalam masyarakat, radikalisasi dapat menimbulkan ketegangan sosial, mengancam persatuan, dan memecah belah kelompok-kelompok yang ada. Ketika

suatu kelompok merasa terpinggirkan atau terancam oleh ideologi ekstrem, hal ini dapat menciptakan polarisasi yang semakin tajam, di mana masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, mengurangi rasa saling pengertian, dan merusak kohesi sosial. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bagi masyarakat malah menjadi sumber konflik, yang pada akhirnya merusak kedamaian dan stabilitas sosial.

Bagi negara, dampak radikalisasi bisa sangat merusak fondasi demokrasi dan stabilitas politik. Ketika ideologi radikal berkembang, hal ini bisa mengarah pada peningkatan kekerasan, terorisme, atau pemberontakan, yang menggoyahkan sistem pemerintahan yang sah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara bisa meningkat, terutama jika negara gagal untuk mengatasi penyebaran ideologi ekstremis atau melindungi hak-hak dasar warganya. Selain itu, radikalisasi dapat mengganggu proses pembangunan ekonomi dan sosial, karena konflik yang timbul dapat menghancurkan infrastruktur, memperburuk ketimpangan sosial, dan mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara adil dan merata. Pada akhirnya, radikalisasi dan ekstremisme dapat memperburuk ketidakstabilan nasional, merusak rasa persatuan, dan menghancurkan nilai-nilai dasar yang menjadi pilar suatu negara demokratis.

Secara keseluruhan, dampak radikalisasi dan ekstremisme tidak hanya merusak kehidupan sosial dan politik, tetapi juga memperburuk keadaan ekonomi dan menciptakan ketegangan yang mengancam integritas bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi fenomena ini melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang kuat, seperti toleransi, penghargaan terhadap

perbedaan, dan komitmen terhadap demokrasi.

BAB IV PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN EKSTREMISME

A. Pengembangan Nilai – nilai Demokrasi dan Toleransi

Nilai demokrasi bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, nilai demokrasi harus dijunjung tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di lingkungan tersebut. Salah satu aspek penting dari nilai demokrasi adalah toleransi, yang mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak setiap individu, termasuk hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk menjalin hubungan sosial, serta hak-hak lainnya dalam kehidupan bersama. Selain itu, dalam konteks demokrasi, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama, serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman hak dan kewajiban keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak mencerminkan kebebasan dan perlindungan yang dimiliki setiap individu, seperti hak untuk beribadat, mengemukakan pendapat, dan menjalani kehidupan sosial sesuai dengan keyakinannya. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap individu untuk menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam kehidupan bersama, serta menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam

demokrasi, kesadaran akan hak dan kewajiban harus berjalan seiring, karena hanya dengan demikian masyarakat dapat hidup harmonis, adil, dan berkelanjutan.

B. Penguatan Identitas Nasional dan Rasa Kebangsaan

Penguatan identitas nasional dan rasa kebangsaan sangat penting dalam membentuk kepribadian nasional yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri suatu bangsa yang terbentuk melalui berbagai faktor, seperti keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Namun, identitas nasional tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas cenderung memiliki watak statis, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada secara turun-temurun, dengan adanya upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Di sisi lain, globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah, dan membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan dalam melihat dan menyeimbangkan kedua kekuatan ini. Untuk memperkuat identitas nasional, terutama di kalangan pelajar, diperlukan upaya melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki visi kebangsaan yang baik, sehingga mereka dapat mendukung dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Peningkatan Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis sangat penting dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Literasi kewarganegaraan, berperan dalam

mempersiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui literasi kewarganegaraan mencakup kualitas pengajaran, kompetensi dosen, motivasi belajar, minat terhadap materi, dan kemampuan kognitif (Nugraheny et al., 2023). Untuk mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, mahasiswa perlu terlibat aktif dalam diskusi publik, pemilihan umum, serta kegiatan advokasi yang terkait dengan isu-isu sosial dan politik. Di samping itu, teori pembelajaran pengalaman menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami konsep-konsep kewarganegaraan, yang dapat mendukung pengembangan keterampilan analitis mahasiswa secara lebih efektif.

BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PILAR ANTI-RADIKALISME DAN EKSTREMISME

A. Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran

Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus berfokus pada integrasi nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keberagaman. Materi pembelajaran perlu dirancang untuk mencakup:

- Nilai-nilai Dasar Kewarganegaraan: Memperkenalkan konsep dasar kewarganegaraan, termasuk hak dan kewajiban warga negara.
- Studi Kasus: Menggunakan contoh nyata dari masyarakat yang menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi isu radikalisme.

- Keterampilan Kritis: Mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi, terutama dalam konteks media sosial yang sering kali menyebarkan ideologi ekstrem.

B. Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Guru merupakan ujung tombak dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mereka sangat penting. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- Pelatihan Berkala: Mengadakan workshop dan seminar untuk memperbarui pengetahuan guru tentang isu-isu terkini terkait radikalisme dan ekstremisme.
- Pengembangan Metodologi Pengajaran: Mendorong guru untuk menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek.
- Mentoring dan Dukungan: Menyediakan program mentoring bagi guru baru untuk memastikan mereka memiliki dukungan dalam menerapkan kurikulum.

C. Penggunaan Metode Pembelajaran yang Interaktif dan Partisipatif

Metode pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami konsep-konsep kompleks dengan lebih baik. Beberapa metode yang dapat diterapkan adalah:

- Diskusi Kelompok: Memfasilitasi diskusi di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang isu-isu sosial dan politik.
- Simulasi dan Role Play: Menggunakan simulasi situasi nyata untuk memberikan pengalaman langsung tentang proses pengambilan keputusan dalam konteks kewarganegaraan.

- **Proyek Komunitas:** Mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat yang relevan dengan tema kewarganegaraan, sehingga mereka dapat melihat dampak langsung dari tindakan mereka.

D. Kolaborasi dengan Institusi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan kewarganegaraan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- **Program Kemitraan:** Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah untuk mendukung program pendidikan kewarganegaraan melalui sumber daya dan materi ajar.
- **Kegiatan Bersama:** Menyelenggarakan kegiatan bersama antara sekolah dan masyarakat, seperti seminar atau lokakarya tentang isu sosial yang relevan.
- **Advokasi Kebijakan:** Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait pendidikan kewarganegaraan.

BAB VI TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI

A. Kendala – kendala yang Dihadapi

Implementasi pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

- **Kurangnya Sumber Daya:** Banyak sekolah kekurangan fasilitas dan bahan ajar yang memadai untuk mendukung program pendidikan kewarganegaraan.
- **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Masih banyak orang tua dan masyarakat umum yang kurang memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

- **Perbedaan Pendapat Ideologis:** Adanya perbedaan pandangan ideologis di masyarakat dapat menyebabkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

B. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan:

- **Penggalangan Dana:** Mendorong partisipasi sektor swasta dalam menyediakan dana atau sumber daya untuk pendidikan kewarganegaraan.
- **Kampanye Kesadaran Publik:** Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan melalui media sosial dan acara komunitas.
- **Dialog Antar Komunitas:** Mendorong dialog antar berbagai kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman bersama mengenai nilai-nilai kebangsaan.

C. Rekomendasi untuk Perbaikan dan Pengembangan

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan meliputi:

- **Evaluasi Kurikulum Secara Berkala:** Melakukan evaluasi rutin terhadap kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kondisi sosial saat ini.
- **Peningkatan Kerjasama Internasional:** Belajar dari praktik terbaik di negara lain dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan.
- **Pengembangan Modul Digital:** Membuat modul pembelajaran digital yang dapat diakses oleh siswa di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil.

BAB VII KESIMPULAN

A. Ringkasan Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk identitas nasional yang kuat dan bertindak sebagai benteng melawan radikalisme dan ekstremisme. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perannya:

1. **Membangun Kesadaran Sosial:** Pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman, yang merupakan landasan untuk menciptakan masyarakat inklusif dan damai.
2. **Keterampilan Berpikir Kritis:** Melalui pendidikan ini, generasi muda dilatih untuk berpikir kritis terhadap berbagai isu, termasuk radikalisasi, sehingga mereka dapat mengenali dan menolak ideologi ekstremis.
3. **Penguatan Identitas Nasional:** Pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di antara siswa, mendorong mereka untuk menghargai perbedaan dan berkontribusi pada persatuan bangsa.
4. **Pendidikan Literasi Digital:** Di era informasi, pendidikan ini juga meliputi literasi digital untuk membantu siswa memilah informasi dan terhindar dari pengaruh negatif di media sosial.
5. **Pendekatan Dialogis:** Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis dialog dan pengalaman dapat meningkatkan efektivitas program, menciptakan ruang untuk diskusi dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial.
6. **Rekomendasi Kebijakan:** Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi pendidikan

yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisasi dan ekstremisme.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi nilai yang penting untuk memperkuat ketahanan nasional.

B. Implikasi dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan integrasi materi anti-radikalisme secara menyeluruh dan dialogis pada berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang mendukung penerapan metode pembelajaran interaktif dan berbasis pengalaman. Strategi pembelajaran baru yang berbasis dialog dan pengalaman juga dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap isu radikalisme dan ekstremisme.

Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman siswa tentang nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Pendekatan multidisiplin juga dapat diterapkan untuk memahami peran pendidikan kewarganegaraan dari perspektif sosial, ekonomi, dan budaya. Kajian tentang efektivitas media digital dalam penyampaian materi pembelajaran juga penting, khususnya untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Penelitian mendatang juga dapat berfokus pada pengukuran keterampilan berpikir kritis siswa secara kuantitatif guna menilai perkembangan mereka setelah mengikuti program pendidikan kewarganegaraan. Terakhir, dampak kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi strategi pendidikan

kewarganegaraan yang komprehensif layak untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Annisa Syifaul Ummah. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Sikap Karakter pada generasi Bangsa. *Jurnal Hukum Borneo Law Review*.
- Calvita, Marshella Cenvysta, Chievo Gabriel Bonar Buntar-Buntar. (2024). Menanggapi Pluralisme dalam Masyarakat Modern ; Peran Demokrasi, Pancasila, dan Penanggulangan Ekstremisme Politik. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*.
- Daffa Salsabila, Fasha Fatimah, Intan Nuraeni, Lussy Sri A, Maufal Rifat RA. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*.
- Emilna, Darlina, Della Putri. Ekstremisme dan Radikalisme sebagai pendorong Terorisme. *Al-Iktiar : Jurnal Studi Islam*.
- Faizutan Nafsiyah, Khusnul Wardan. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Putri Indah Pertiwi, Dinie Anggraeni Dewi. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Warga Negara Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*.
- Rexi Pandri, Eva Damayanti, Metri Afriani, Rahmi Putri Pratama, Nurhayati, Juneti, Angga Karomi. (2021). Pengembangan ilai-nilai Demokratis Mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education*.
- Rizal Fahmi, Aisha Nadya, Nursanda Rizky Adhari, Zidan Baynal Hubi. (2021). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Siti Asiyah, Moch. Nasrullah, Umdatul Baroroh. (2024). Dakwah Anti Radikalisme Melalui Media Instagram (Analisis Konten di Instagram Infonusa). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*.
- Trisna Sukmayadi, Mahmuda Maarif, Hermalia Rosalina Fitri, Ainum Karunia Dewi, Yulia Gesti Merkuri, Ani Nur Haryanti. (2024). Membangun Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa melalui Literasi Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*.